

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Pada Penelitian yang terdahulu yang dijadikan sebagai sumber rujukan dalam penelitian terdahulu tentang Pengaruh *Fiscal Stress* terhadap Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal adalah sebagai berikut:

1. Havid Sularso dan Yanuar E.Restianto (2011)

Penelitian yang dilakukan oleh Havid Sularso dan Yanuar E.Restianto (2011). Pada penelitian ini, Peneliti ingin melihat apakah kinerja keuangan pemerintah daerah dapat mengukur keuangan terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi serta keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan otonomi daerah. Peneliti terdahulu dalam melakukan analisis datanya menggunakan alat analisis berupa SEM (Structural Equation Modeling) yang mampu menjelaskan secara simultan pengaruh tersebut.

Pada penelitian terdahulu, peneliti menggunakan AMOS (Analysis of Moment Structures) yang dapat memudahkan seorang peneliti dalam melakukan analisisnya secara simultan, lebih ringkas, efisien dan dapat di pahami oleh peneliti dalam memberikan hasil gambaran akan judul yang di teliti. Pada penelitian ini, peneliti mengambil sampel yang berada pada seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah yang Berjumlah 35 Kabupaten/Kota. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan

keuangan pemerintah Daerah tahun 2006 – 2009 yang disusun berdasarkan PP.No.24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan permendagri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta data – data statistik ekonomi daerah.

Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh Havid Sularso dan Yanuar E.Restianto adalah bahwa pengalokasian belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah dipengaruhi oleh kinerja keuangan khususnya rasio ketergantungan keuangan, rasio kemandirian keuangan, rasio efektivitas PAD dan derajat kontribusi BUMD. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa derajat desentralisasi tidak memiliki pengaruh terhadap alokasi belanja modal sehingga semakin baik kinerja keuangan pemerintah daerah maka semakin tinggi alokasi belanja modalnya. Alokasi Belanja Modal memberikan pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dan implikasi dari penelitian ini adalah bahwa pemerintah daerah harus senantiasa meningkatkan kinerja keuangannya karena akan berdampak pada peningkatan belanja modal.

2. Budi Setiawan dan Priyo Hari Adi (2008)

Pada penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai sumber rujukan dalam penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Budi Setiawan dan Priyo Hari Adi (2008). Pada penelitian terdahulu, peneliti mendapatkan informasinya melalui data sekunder. Peneliti terdahulu dalam melakukan penelitiannya menggunakan variabel dependen yaitu Pengaruh Fiscal Stress

dengan variabel independennya adalah pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal.

Pada penelitian terdahulu, peneliti dalam melakukan analisisnya dengan menggunakan Uji Kolmogorov-Smirnov yang merupakan syarat utama sebelum melakukan analisis uji Regresi. Karena peneliti menggunakan beberapa sampel yaitu Data APBD yang merupakan data sebelum diberlakukannya otonomi daerah pada periode 1999 – 2000 dan saat dilaksanakannya otonomi daerah pada periode 2001-2003 yang diperoleh dari laporan statistik keuangan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah yang diterbitkan oleh Biro Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah.

Kesimpulan dari penelitian tersebut, seorang peneliti terdahulu ingin membuktikan bahwa pelaksanaan undang-undang tentang otonomi daerah dan undang-undang yang membatasi penarikan pajak bagi pendapatan daerah, mengakibatkan pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah rata-rata mengalami tekanan keuangan. Hal tersebut menunjukkan bahwa dengan tingginya rasio realisasi PAD terhadap target PAD dengan indikasi upaya pajak atau dengan kata lain dapat terjadinya *fiscal stress*.

3. Johan Arifin (2005)

Penelitian yang dilakukan oleh Johan Arifin (2005). Peneliti ingin membahas tentang perbedaan kinerja keuangan daerah sebelum dan pada saat terjadinya *fiscal stress* dalam rangka sebuah daerah menghadapi otonomi daerah. Peneliti terdahulu memilih sektor keuangan karena merupakan aspek yang sangat penting apabila hendak menjalankan suatu

organisasi baik swasta maupun publik agar tetap dapat bertahan dan dapat mencapai tujuan organisasi (Jones:1996). Peneliti ingin mengetahui kinerja keuangan suatu pemerintah daerah dalam rangka mengetahui kesiapan daerah tersebut dalam menghadapi otonomi daerah, dalam penelitian ini digunakan variabel-variabel yang meliputi: kemampuan pembiayaan, kemampuan mobilisasi daerah, tingkat ketergantungan dan desentralisasi fiskal.

Pada penelitian ini, peneliti terdahulu menggunakan sampel yang ada pada Provinsi Jawa Barat pada periode 1995-2000. Data yang dibutuhkan dalam sampel ini adalah data yang berupa realisasi APBD kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa barat yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Propinsi Jawa Barat. Peneliti menggunakan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD), pajak daerah, total pendapatan daerah, total penerimaan APBD tanpa subsidi, serta belanja-belanja lainnya. Teknik analisis yang dipakai dalam analisis ini adalah peneliti menggunakan pengujian normalitas data dengan *one sample kolmogorov sminornov test* dan uji pendamping yang digunakan adalah uji nonparametik *Wilcoxon Sign Rank Test*.

Kesimpulan pada penelitin terdahulu yang dilakukan oleh Johan Arifin (2005) adalah kinerja keuangan daerah yang diukur dengan beberapa variabel pengukur menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah sebelum fiscal stress lebih baik dibandingkan pada saat terjadinya *fiscal stress*. Hal ini menunjukkan bahwa dengan semakin menurunnya kinerja keuangan daerah

yang diukur dengan menggunakan tingkat pembiayaan, tingkat ketergantungan dan tingkat desentralisasi fiskal. *Fiscal Stress* yang disebabkan oleh terjadinya krisis ekonomi di Indonesia mempengaruhi kinerja keuangan pada pemerintah daerah kabupaten/kota khususnya di Jawa Barat. Fiscal Stress dapat menyebabkan ketidakstabilan kinerja keuangan pemerintah daerah yang pada akhirnya mempengaruhi kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi otonomi daerah, karena untuk menghadapi otonomi daerah sebuah daerah dituntut untuk mandiri dalam kinerja keuangannya.

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Peneliti

Havid Sularso (2011)	
Variabel Tergantung	Kinerja Keuangan
Variabel Bebas	Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi
Subjek Penelitian	Seluruh Kabupaten / Kota Provinsi Jawa Tengah
Teknik Sampling	<i>Purposive Sampling</i>
Metode Pengumpulan Data	Dokumentasi yang meliputi Data sekunder
Teknik Analisa Data	<i>SEM (Structural Equation Modeling)</i>

Budi Setiawan dan Priyo Hari Adi (2008)	
Variabel Tergantung	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Belanja Modal
Variabel Bebas	<i>Fiscal Stress</i>
Subjek Penelitian	Seluruh Kabupaten / Kota Provinsi Jawa Tengah
Teknik Sampling	<i>Purposive Sampling</i>
Metode Pengumpulan Data	Dokumentasi yang meliputi Data sekunder
Teknik Analisa Data	<i>Regresi</i>

Johan Arifin (2005)	
Variabel Tergantung	Kinerja Keuangan
Variabel Bebas	Sebelum Fiscal Stress dan Pada Saat Fiscal Stress yang diukur dengan kemampuan pembiayaan, kemampuan mobilisasi daerah, tingkat ketergantungan dan desentralisasi fiskal.
Subjek Penelitian	Seluruh Kabupaten / Kota Provinsi Jawa Barat
Teknik Sampling	<i>Purposive Sampling</i>
Metode Pengumpulan Data	Dokumentasi yang meliputi Data sekunder
Teknik Analisa Data	<i>Paired Sampel T Test dan Wilcoxon Sign Rank Test.</i>

Peneliti Sekarang	
Variabel Tergantung	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal (BM)
Variabel Bebas	<i>Fiscal Stress</i>
Subjek Penelitian	Seluruh Kabupaten / Kota Provinsi Jawa Timur
Teknik Sampling	<i>Purposive Sampling</i>
Metode Pengumpulan Data	Dokumentasi yang meliputi Data sekunder
Teknik Analisa Data	<i>Regresi Sederhana</i>

2.2. Landasan Teori

2.2.1. *Fiscal Stress*

Secara Sederhana dapat dikatakan bahwa pemerintah yang mengalami fiscal stress adalah pemerintah daerah yang kurang mampu menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik. Dengan arti lain, bahwa pemerintah yang mendapat dana dari penerimaan daerah yang tidak stabil selama krisis ekonomi yang dapat menyebabkan adanya kondisi tekanan keuangan (*Fiscal Stress*), sehingga terjadi penurunan rata-rata pendapatan dan belanja daerah (Andayani:2004). Dari

pengertian tersebut dapat ditarik penjelasan bahwa *Fiscal Stress* merupakan suatu kondisi atau konflik yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dari tiap-tiap Kabupaten/Kota yang mengalami permasalahan akibat adanya keterbatasan dalam penerimaan daerah yang mengakibatkan pertumbuhan suatu daerah mengalami suatu masalah yang sangat rumit akibat tidak cukupnya Penerimaan Daerah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah harus bisa mengatur keuangan daerah seefektif dan seefisien mungkin dalam menjalankan kegiatan perekonomian suatu daerah yang dapat berguna untuk menciptakan perekonomian dan kemakmuran rakyat.

Fiscal Stress (tekanan keuangan) merupakan salah satu dampak dari krisis ekonomi yang menimpa Indonesia yang berupa tekanan kondisi keuangan. *Fiscal Stress* mengakibatkan ketidakpastian anggaran dari pihak pemerintah baik anggaran penerimaan maupun anggaran pengeluaran. Pada kenyataannya yang terjadi pada sektor pemerintahan di Indonesia sebagai dampak *fiscal stress* didukung dengan teori yang dikemukakan oleh Spicer dan Bingham dalam Beier (1998) yaitu “ketika perubahan faktor-faktor ekonomi, demografi, dan politik membatasi pertumbuhan pendapatan maka tingkat defisit yang terjadi semakin lebih sulit dan tekanan keuangan mungkin akan terjadi.

Menurut Rogers (1990) disamping ketidakpastian anggaran, dampak *fiscal stress* adalah mempengaruhi kesiapan suatu daerah dalam menghadapi otonomi daerah. Jika suatu daerah akan menghadapi otonomi daerah, kondisi keuangan daerah tersebut harus stabil, karena jika kondisi keuangan tidak stabil akan

menjamin daerah tersebut membiayai daerahnya sendiri dan sukses dalam melaksanakan otonomi daerahnya.

2.2.2 Laporan keuangan Pemerintah Daerah

Salah satu aspek yang paling penting dalam pencapaian tata kelola Pemerintahan yang baik dalam membangun pertumbuhan perekonomian suatu daerah adalah menyusun anggaran APBD yang merupakan program kerja Tahunan Pemerintah Daerah dalam bentuk perangkaan (Rupiah). Sebagai pedoman daerah APBD ditetapkan dengan peraturan daerah yang digunakan sebagai pedoman untuk kegiatan pertumbuhan perekonomian selama satu periode. Dimana dalam penyelesaian anggaran tersebut akan menghasilkan sebuah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Dimana di dalam laporan keuangan pemerintah daerah ini merupakan satu komponen yang paling penting untuk menciptakan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah disektor publik sebagaimana yang telah disepakati antara Legislatif dan Eksekutif, maka disusun dan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Meskipun demikian, informasi keuangan bukan merupakan tujuan akhir dari akuntansi sektor pemerintahan.

Laporan keuangan pemerintahan daerah menunjukkan kondisi keuangan daerah secara keseluruhan. Dari laporan ini akan terbaca bagaimana kondisi pemerintah yang sesungguhnya, termasuk kelemahan dan kekuatan yang dimilikinya. Laporan ini juga menunjukkan kinerja pemerintah daerah selama satu periode. Laporan keuangan juga memberikan informasi dasar pertimbangan untuk pengambilan keputusan.

Tabel 2.2.2
Contoh Format Laporan Realisasi Anggaran Penerimaan Pendapatan Dan Belanja
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20xx

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
	PENERIMAAN DAERAH	xxx	xxx	xxx	Xxx
	Pendapatan Daerah				
	1. Pendapatan Asli Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
	2. Pendapatan Pajak Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
	3. Pendapatan Retribusi Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
	4. Lain2 PAD yang sah	xxx	xxx	xxx	xxx
	Total Pendapatan Asli Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
	Pendapatan Transfer				
	1. Dana bagia hasil pajak	xxx	xxx	xxx	xxx
	2. Dana bagi hasil Sumber daya alam	xxx	xxx	xxx	xxx
	3. Dana alokasi umum	xxx	xxx	xxx	xxx
	4. Dana alokasi khusus	xxx	xxx	xxx	xxx
	Jumlah pendapatan transfer lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya				
	1. Dana otonomi khusus	xxx	xxx	xxx	xxx
	2. Dana penyesuaian	xxx	xxx	xxx	xxx
	Jumlah pendapatan transfer lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
	Transfer Pemerintah Provinsi				
	1. Pendapatan bagi hasil pajak	xxx	xxx	xxx	xxx
	2. Pendapatan bagi hasil lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
	Jumlah pendapatan transfer	xxx	xxx	xxx	xxx
	Lain-lainpendapatan yang sah				
	1. Pendapatan hibah	xxx	xxx	xxx	xxx
	2. Pendapatan dana darurat	xxx	xxx	xxx	xxx
	3. Pendapatan lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
	Jumlah pendapatan	xxx	xxx	xxx	xxx
	PENGELUARAN DAERAH				
	Belanja Tidak langsung				

1. Belanja pegawai	xxx	xxx	xxx	xxx
2. Belanja bunga	xxx	xxx	xxx	xxx
3. Belanja subsidi	xxx	xxx	xxx	xxx
4. Belanja hibah	xxx	xxx	xxx	xxx
5. Belanja bantuan social	xxx	xxx	xxx	xxx
6. Belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota dan pemerintah desa	xxx	xxx	xxx	xxx
7. Belanja bantuan keuangan kepada kabupaten/kota dan pemerintah desa	xxx	xxx	xxx	xxx
8. Belanja tidak terduga	xxx	xxx	xxx	xxx
Total belanja tidak langsung	xxx	xxx	xxx	xxx
Belanja langsung				
1. Belanja pegawai	xxx	xxx	xxx	xxx
2. Belanja barang dan jasa	xxx	xxx	xxx	xxx
3. Belanja modal	xxx	xxx	xxx	xxx
Total Biaya langsung	xxx	xxx	xxx	xxx

2.2.3. Pertumbuhan Ekonomi

Secara umum pertumbuhan Ekonomi dapat diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam membangun perekonomian suatu daerah yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat dapat bertambah dan kemakmuran masyarakat dapat meningkat. Menurut Adi (2007) secara spesifik ada tiga faktor dalam dalam perekonomian ekonomi yaitu akumulasi modal, pertumbuhan penduduk, dan hal – hal yang berkaitan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja yang dianggap secara positif dapat merangsang dan menciptakan pertumbuhan perekonomian suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai meningkatnya kegiatan perekonomian pada suatu daerah yang berdampak pada tingkat kemakmuran dan kemandirian daerah. Pertumbuhan ekonomi akan terjadi apabila seluruh pemangku kepentingan di daerah bekerja sama dalam membangun

dan meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi seperti meningkatkan investasi untuk pembangunan di sektor – sektor yang produktif.

2.2.4 Pengertian Tentang Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen sumber Pendapatan Daerah sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Sumber Pendapatan Daerah terdiri dari:

1. Hasil Pajak Daerah

Jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. Sedangkan jenis pajak daerah untuk kabupaten terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan C.

2. Hasil Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Ada tiga golongan retribusi daerah yaitu:

- a. Retribusi jasa umum, yaitu retribusi atas jasa yang diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

- b. Retribusi jasa usaha, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
 - c. Retribusi perizinan tertentu, yaitu retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana/fasilitas tertentu guna untuk melindungi kepentingan umum dan kelestarian lingkungan.
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
- Pendapatan yang berupa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, terdiri dari bagian laba atas penyertaan modal/investasi pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal/investasi pada perusahaan milik pemerintah/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal/invesatsi pada perusahaan milik swasta.
- 4, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
- Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terdiri dari hasil penjualan aset daerah yang tidak dapat dipisahkan, penerimaan jasa giro, penerimaan bunga, penerimaan ganti rugi atas kekayaan daerah (TGR), komisi, potongan, dan keuntungan selisih nilai tukar rupiah, denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, denda pajak, denda retribusi, hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, fasilitas social dan fasilitas umum,

pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan, dan lain-lain.

2.2.5. Belanja Modal

Menurut (Havid, 2011) Belanja Modal adalah pengeluaran pemerintah daerah yang manfaatnya lebih dari satu tahun anggaran dan akan menambah asset atau kekayaan daerah dan berakibat menambah belanja yang bersifat rutin. Belanja modal dapat diklasifikasikan dalam dua kelompok yaitu belanja publik dan belanja aparatur.

1. Kelompok kedua adalah belanja aparatur yaitu belanja yang manfaatnya tidak dinikmati langsung oleh masyarakat tetapi dapat dinikmati dan dirasakan langsung oleh aparatur. Misalnya: Pembangunan jembatan, pembelian mobil ambulans untuk umum dan lain-lain.
2. Kelompok kedua adalah belanja aparatur yang merupakan belanja yang memiliki manfaat untuk dapat dinikmati oleh masyarakat. Misalnya: pembangunan gedung dewan, pembelian mobil dinas, dan lain-lain. Hampir semua anggaran belanja modal mengandung komitmen adanya pengeluaran dalam jangka waktu yang cukup panjang.

Belanja modal sangat erat kaitannya dengan investasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Halim (2008) menyatakan bahwa kata investasi dapat diartikan macam - macam tergantung pada titik pandang atau konteks dalam mengartikannya. Investasi termasuk dalam pengertian belanja modal adalah capital

expenditure, yang didefinisikan sebagai belanja /biaya /pengeluaran yang memberikan manfaat.

Dalam PP No. 58 Tahun 2005 disebutkan bahwa belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan, dan mesin. Gedung dan bangunan, jaringan, buku perpustakaan dan hewan

2.3. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan konsep – konsep dasar teori yang dijelaskan diatas, maka dalam penelitian ini variabel – variabel yang digunakan untuk mengetahui pengaruh *fiscal stress* pada pemerintahan suatu daerah adalah Pertumbuhan PAD dan pertumbuhan Belanja Modal.

Sedangkan untuk pengaruh *fiscal stress* pemerintahan suatu negara terhadap Pendapatan Asli Daerah telah menunjukkan sesuatu yang dapat berpengaruh positif . Hal ini menunjukkan bahwa ada keterikatan antara *fiscal stress* dengan Pendapatan Asli Daerah. Menurut Halim (2001) telah memberikan fakta yang cukup empiris bahwa *fiscal stress* dapat mempengaruhi APBD suatu daerah, sehingga hal ini dapat dibuktikan bahwa adanya pergeseran (kenaikan/penurunan) dari komponen penerimaan dan pengeluaran APBD. Dalam hal ini menunjukkan bahwa komponen penerimaan dan pengeluaran suatu APBD dapat menimbulkan kondisi *fiscal stress* suatu daerah, sehingga kemakmuran suatu daerah tidak dapat sesuai dengan apa yang dianggarkan oleh pemerintah daerah dan dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat menjadi lambat. Oleh karena itu pemerintah daerah

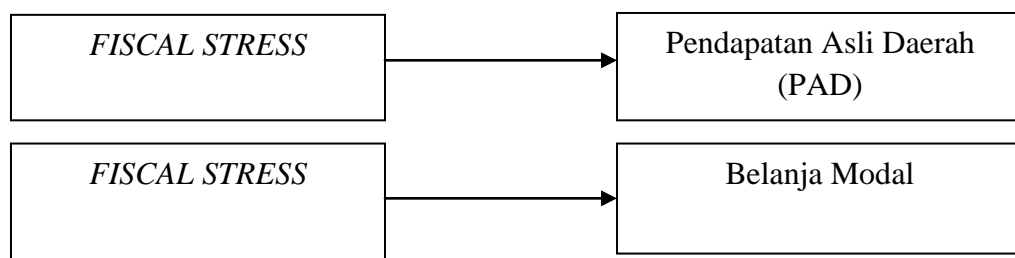
dituntut untuk proaktif dalam mengatur baik adanya penerimaan dan pengeluaran daerahnya secara konsumtif, dalam arti bahwa pemerintah harus sesuai dengan apa yang dikerjakan sesuai dengan program kerja yang dijalankan oleh pemerintah.

Menurut Purnaninthesa dan Dongori (2006) telah menunjukkan fakta empiris yang hampir sama bahwa, *fiscal stress* mempunyai pengaruh yang positif terhadap tingkat pembiayaan daerah. Hal ini dapat menunjukkan bahwa tingkat pembiayaan daerah sangat dipengaruhi oleh kondisi *fiscal stress* sehingga pemerintah harus bersikap lebih optimis dalam meningkatkan potensi pendapatan suatu daerah.

Dalam Penelitian (Andayani:2004) telah mengungkapkan bahwa dalam menguji kondisi *fiscal stress*, daerah yang mengalami *fiscal stress* yang tinggi yaitu pada saat krisis ekonomi maka terdapat kecenderungan dalam peningkatan belanja modal suatu daerah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa suatu daerah dapat mengalami kecenderungan *fiscal stress* pada saat belanja suatu daerah itu meningkat.

Variabel – variabel tersebut dapat digambarkan dalam kerangka pemikiran teoritis berikut ini:

Gambar 2.3
Kerangka Pemikiran



2.4. **Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, landasan teori, serta kerangka pemikiran dalam penelitian ini. Hipotesis yang akan dibahas dan digunakan untuk menguji variabel – variabel bebas yang berpengaruh terhadap variabel terikat adalah sebagai berikut:

- H1: Terdapat Pengaruh antara *Fiscal Stress* terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Provinsi Jawa Timur?
- H2: Terdapat Pengaruh antara *Fiscal Stress* terhadap Belanja Modal pada Provinsi Jawa Timur?